

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konflik Antar Umat Beragama (Islam- Kristen)

1. Pengertian Konflik

Secara umum, munculnya perbedaan kepentingan dapat mengakibatkan suatu benturan atau kejadian yang dikenal sebagai konflik, yang bisa terjadi antara individu dan individu, atau antara individu dan masyarakat atau kelompok lainnya.¹ Sedangkan KBBI mendefinisikan konflik sebagai situasi di mana terjadi percecokan, perselisihan, atau pertentangan antara pihak-pihak yang terlibat.²

Konflik, menurut definisi dari Hurgh F. Halverstadt, adalah benturan kekuasaan yang terjadi karena adanya perbedaan dalam informasi, keyakinan, kepentingan, keinginan, nilai-nilai, dan kemampuan untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Jay Hall, sebagaimana yang dikutip oleh Hurgh F. Halverstandt, mengartikan konflik sebagai kondisi emosional atau substansial yang muncul akibat perbedaan di antara pihak-pihak yang memiliki

¹Kaja, *Pengambilan Keputusan Suatu Tindakan dan Solusi* (Klaten: Lakeisha, 2022), 94.

²Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 587.

hubungan yang berbeda karena berbagai alasan.³

Dalam tulisan Moh. Soleh Isre, Rupert Brown menyatakan bahwa faktor yang mempertahankan konflik adalah kehadiran sikap atau keyakinan individu atau kelompok dalam merendahkan orang lain atau kelompok lain, menyatakan hal-hal negatif, atau menunjukkan perilaku permusuhan atau diskriminasi terhadap anggota kelompok lain hanya karena keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut.⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa konflik adalah sebuah perselisihan karena adanya sikap dan pokok pikiran yang berbeda-beda, gagasan dan pendapat yang berbeda yang dapat menimbulkan sebuah perselisihan dan percekocokan dalam sekelompok orang.

Terdapat tiga sumber utama dari sikap atau kepercayaan yang meliputi motivasi psikologis yang berasal dari perasaan frustrasi, kemarahan, dan perasaan ketertindasan yang akhirnya berubah menjadi pandangan rendah atau menyalahkan orang lain. Kemudian, terdapat sumber kognitif yang muncul dari proses pengolahan informasi yang membentuk stereotipe atau prasangka berdasarkan penilaian

³ Moh. Soleh Isre, *Konflik Etno Religius Indonesia Konteporer* (Jakarta: Dapertemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2003), 5.

⁴ *Ibid.*, 8.

karakteristik perilaku orang lain. Yang terakhir adalah sumber kultural yang berasal dari nilai dan norma yang ditransmisikan melalui agen sosialisasi yang menyebabkan seseorang atau kelompok menyesuaikan diri dengan norma dan nilai yang dianut, sehingga norma dan nilai dari kelompok atau komunitas lain dianggap kurang pantas.⁵

Beberapa abad yang lalu, terjadi perselisihan antara agama Islam dan Kristen. Pihak umat Kristen menyalahkan Islam sebagai penyebab ketidakharmonisan antara kedua agama. Namun, ada yang melupakan bahwa umat Kristen sendiri juga pernah melakukan tindakan yang keji dan memalukan dalam perang salib. Keberadaan Islam di Eropa yang mempengaruhi kebudayaannya terutama terjadi setelah wilayah Spanyol dan Sisilia dikuasai oleh umat Muslim. Pada bulan Juli tahun 710, sekelompok Muslim menyeberangi Selat Gibraltar dari Afrika Utara menuju selatan Spanyol, sehingga memicu hasrat untuk menyerang.⁶ Sehingga pada saat itu mulailah terjadi konflik-konflik yang melibatkan identitas agama yaitu Kristen dan Islam.

Julianus Mojau menyatakan bahwa terdapat tiga faktor yang erat kaitannya dengan kebuntuan hubungan antara Islam dan Kristen di Indonesia pada masa Orde Baru. Faktor pertama adalah adanya

⁵ Ibid., 9.

⁶ W. Montgomery Watt, *Islam dan Peradaban Dunia : Pengaruh Islam atas Eropa Abad Pertengahan* (Jakarta: Gramedia, 1997), 2.

prasangka yang didasarkan pada penilaian atau anggapan berdasarkan perilaku orang lain yang masih kuat di kalangan umat Islam Indonesia, terutama dalam Islam politik, yang menganggap agama Kristen sebagai agama penjajah. Kedua, Islam politik merasa tidak adil karena kebijakan politik rezim Orde Baru dalam kebijakan publik, yang disebut sebagai pembangunan nasional dalam kerangka Pancasila. Ketiga, prasangka ini diperburuk oleh kegiatan gereja-gereja di Indonesia yang dianggap terlalu menunjukkan kepentingan penguasa Orde Baru.⁷ Jadi karena adanya ketiga prasangka buruk ini sehingga hubungan Islam dan Kristen.

2. Manajemen Konflik

Manajemen konflik melibatkan rangkaian tindakan dan respons antara individu atau kelompok yang terlibat dalam situasi konflik, dan merupakan suatu pendekatan berbasis proses yang bertujuan untuk membentuk bentuk komunikasi dan perilaku yang mempengaruhi kepentingan dan interpretasi dari semua pihak yang terlibat. Bagi pihak yang terlibat di luar konflik, keakuratan informasi tentang situasi konflik memiliki kepentingan yang sangat besar.⁸

⁷ Julianus Mojau, *Meniadakan atau Merangkul?* (Jakarta: Gunung Mulia, 2012), 4.

⁸ Dkk Eko Sudarmanto, *Manajemen Konflik* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 3.

Menurut Ross, manajemen konflik berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat atau mediator untuk membimbing perbedaan pandangan ke arah hasil tertentu. Hasil tersebut bisa berupa penyelesaian konflik yang positif, kreatif, dan harmonis, ataupun hasil yang agresif atau tidak menghasilkan perdamaian. Mereka yang terlibat dalam penanganan konflik dapat ikut serta, berkolaborasi untuk mencari solusi, atau meminta bantuan dari pihak lain untuk menentukan keputusan. Strategi manajemen konflik yang menitikberatkan pada proses meliputi interaksi komunikasi, perilaku, serta pengaruh kepentingan dan penafsiran masing-masing pihak terhadap konflik.⁹

Fisher memperluas konsep transformasi konflik untuk mencakup semua situasi yang mungkin terjadi. Upaya pencegahan bertujuan untuk menghindari konflik yang merusak, sedangkan upaya penyelesaian bertujuan untuk mengakhiri tindakan kekerasan melalui kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Usaha pengelolaan konflik bertujuan membatasi juga mencegah kekerasan dengan mempromosikan perubahan perilaku positif bagi semua pihak yang terlibat. Di sisi lain, resolusi konflik tidak hanya menangani akar permasalahan konflik, melainkan juga berupaya untuk membangun hubungan yang baru dan

⁹ Juharni, *Manajemen Mutu Terpadu* (Makassar: Sah Media, 2017), 202.

berkelanjutan antara kelompok yang sebelumnya saling bermusuhan. Transformasi konflik fokus pada penyelesaian sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas, dan merubah energi negatif dari konflik menjadi energi positif yang dapat diterapkan untuk memperkuat relasi sosial dan politik.¹⁰ Seluruh rangkaian upaya ini saling terkait dan harus dilakukan secara berurutan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mengelola konflik.

Dialog merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan konflik. Seringkali konflik muncul karena seseorang merasa telah berkomunikasi dengan baik, padahal pada kenyataannya tidak.¹¹ Menurut Galtung, solusi dari konflik bergantung pada sejauh mana dialog mampu menjangkau akar permasalahan konflik. Pentingnya dialog tidak hanya terbatas pada proses negosiasi untuk mencapai penyelesaian konflik, namun juga dapat membantu semua pihak yang terlibat untuk memahami cara menjadi pendengar yang baik.¹² Jadi, Galtung berpendapat bahwa konflik dapat teratasi dengan sejauh mana dialog mampu menjangkau akar permasalahan dari konflik.

¹⁰ M. Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern," *Jurnal Al-Hikmah* 3 (2017): 12–13.

I Nyoman Sudira, "Dialog Dalam Resolusi Konflik-Interaktif," *Jurnal Ilmiah hubungan Internasional* 12, no. 1 (2016): 2.

¹² *Ibid.*, 6.

Konflik dapat terjadi akibat perbedaan dalam interpretasi, yang sering kali disebabkan oleh perbedaan pengalaman dari latar belakang yang berbeda. Sebuah individu dapat dipengaruhi oleh pemikiran dan pandangan dari kelompoknya, yang kemudian dapat menghasilkan karakter yang berbeda, yang mungkin dapat menimbulkan konflik. Walaupun banyak yang menganggap konflik selalu memiliki dampak yang negatif, namun dalam situasi tertentu, konflik dapat memberikan manfaat penting dalam pembentukan dan pengembangan kepribadian seseorang.¹³ Jadi, Konflik bisa terjadi di antara individu, kelompok, atau organisasi. Jika dua individu mempunyai pandangan yang saling bertentangan dan kurang toleran, maka konflik dapat timbul. Akan tetapi, konflik tidak selalu harus dihindari atau ditakuti, karena jika dikelola dengan baik, konflik bisa menjadi kekuatan yang kuat dalam inovasi dan pengembangan suatu organisasi.

1. **Konflik Poso**

Poso, secara umum dianggap sebagai lambang persatuan Indonesia yang menampung beragam budaya, suku, dan agama. Meskipun keragaman ini dapat memungkinkan koeksistensi damai, konflik sosial dan sentimen negatif muncul di tahun 1998 karena

¹³ Eko Sudarmanto, *Manajemen Konflik*, 17.

perbedaan agama yang menjadi penyebab utama dari konflik tersebut di wilayah Poso.¹⁴

Konflik Poso, pada mulanya, merupakan bagian dari konflik individu yang kemudian meluas hingga mempengaruhi aspek agama. Meskipun pada akhirnya, konflik tersebut berasal dari permasalahan subsistem budaya, khususnya mengenai suku dan agama. Kedua faktor tersebut menjadi pemicu bagi perpecahan umat beragama di Poso dan menjadi titik awal dari serangkaian konflik yang membawa luka sejarah bagi masyarakat Indonesia.¹⁵

Pada tanggal 24 Desember 1998, terjadi sebuah insiden di Poso yang melibatkan beberapa pemuda yang memiliki keyakinan agama yang berbeda-beda. Terjadi gejala sentimen agama yang amat kuat di kalangan komunitas Muslim dan Kristen dikarenakan peristiwa tersebut berlangsung pada saat perayaan Natal serta bulan puasa, dan terjadi di tengah-tengah situasi politik yang sedang memanas karena dilaksanakannya pemilihan bupati di Poso. Walau pada awalnya hanya merupakan perkelahian antara beberapa pemuda, namun seiring

¹⁴ Dkk Ilovia Aya regita Widayat, Diana Mutiara Bahari, "Konflik Poso: Sejarah Dan Upaya Penyelesaian," *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 13 (2021): 4.

¹⁵ Toto Tasmara, *Membudidayakan Etos Kerja Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 39.

berjalannya waktu, insiden tersebut berubah menjadi masalah konflik agama yang melibatkan kedua agama yang ada di Poso.¹⁶

Pada tanggal 15 April 2000, terjadi dua peristiwa penting yang terkait dengan deretan konflik di Poso. Peristiwa pertama adalah publikasi artikel di *Mercusuar* yang memaparkan hasil wawancara dengan Chaelani Umar, seorang anggota DPRD Sulawesi Tengah. Dalam wawancara tersebut, Chaelani Umar menyatakan bahwa jika pemerintah daerah tidak memenuhi tuntutan untuk menunjuk Drs. Damsyik Ladkjalani sebagai Sekwilda Poso, maka akan terjadi kerusuhan di Kota Poso yang serupa dengan konflik bernuansa sara yang terjadi pada tahun 1998. Di samping itu, keadaan semakin merosot karena terjadi pertikaian antara kelompok pemuda Lombokia dan Kayamanya di stasiun terminal, yang menghasilkan penghancuran 127 rumah, 2 bangunan gereja, Sekolah Kristen, dan gedung Bhayangkara karena terbakar.¹⁷

Pada tanggal 16 Mei 2000, terdapat seorang warga Muslim di Taripa yang telah menjadi korban tewas akibat pembunuhan. Setelahnya, timbul spekulasi mengenai serangan yang dilakukan oleh pasukan merah dari arah Tentena sebagai bentuk balasan atas perselisihan sebelumnya yang terjadi pada bulan April. Akibat situasi konflik yang semakin meruncing, warga Kristen terpaksa mengungsi dari wilayah tersebut.

¹⁶ Igneus Alganih, "Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)," *Jurnal CRIKSENTRA* 5 (2016): 170.

¹⁷ Firdaus M. Yunus, "Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya," *Jurnal Substantia* 16 (2014): 6.

Konflik dimulai ketika pasukan Cornelis Tibo, yang dikenal sebagai kelompok kelelawar atau ninja menyerang Pondok Pesantren Wali Sanga dan membunuh tujuh puluh orang. Pasukan tersebut mengenakan pakaian serba hitam. Kondisi semakin memburuk karena terjadi kelangkaan bahan makanan dan bahan bakar. Kelompok putih yang dipimpin oleh Habib Saleh Al Idrus berhasil membunuh pemimpin pasukan merah, yaitu Ir. Lateka, namun upaya mereka untuk memulihkan situasi gagal. Terdapat empat konflik Poso yang terjadi sebagai hasil dari konflik-konflik sebelumnya yang kumulatif. Media telah melakukan pengelompokan peristiwa berdasarkan urutan waktu, namun tidak terlalu terang dalam menguraikan latar belakang serta pemicu dibalik masing-masing kerusuhan. Pada tahun 2001, situasi masih belum menentu dan pertentangan menyebar ke berbagai wilayah.¹⁸

B. Dialog Antarumat Beragama

Kondisi yang semakin memburuk di beberapa wilayah seperti Poso dan Maluku disebabkan oleh ketegangan dan kekerasan yang timbul akibat sentimen agama (Islam-Kristen), yang menyebabkan kerusakan pada tempat-tempat ibadah seperti masjid, musholla, dan gereja. Meskipun upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Perundingan Malino I dan Perundingan Malino II untuk

¹⁸ Ibid., 6-7.

mengatasi konflik, namun perbedaan pandangan antar umat beragama masih belum dapat diatasi dan dicegah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara ajaran dan nilai-nilai suci Tuhan dengan realitas di masyarakat. Kemudian diadakan perundingan Malino II.¹⁹ Di Perundingan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar dalam menciptakan perdamaian dan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia

Suatu perselisihan yang timbul karena fanatisme agama memiliki beberapa pola, di antaranya adalah pertumbuhan kesadaran dan internalisasi terhadap ajaran yang dianut. Proses psikologis ini menghasilkan pengakuan fanatik terhadap ajaran yang dipeluknya, sementara pada saat yang sama menimbulkan pandangan negatif terhadap agama atau ajaran yang dianut oleh pihak lain. Kedua, kesadaran kolektif untuk mempertahankan dan memperkuat keyakinan yang dipandang benar, dapat memunculkan perilaku fanatik dan gerakan fundamentalis yang radikal. Ketiga, fanatisme keagamaan secara doktriner didasarkan pada kesadaran untuk mempertahankan ajaran yang dianut. Keempat, pandangan bahwa susunan dan dinamika masyarakat tidak sesuai dengan tatanan kehidupan yang dianjurkan oleh

¹⁹ Qowa'id, "Dialog Antar Umat Beragama Di Kalimantan Selatan," *Jurnal penamas* (n.d.): 39.

agama, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi kehidupan yang berbasis pada doktrin agama.²⁰

Terdapat beberapa langkah strategis dalam mengatasi fanatisme agama yang berdampak pada konflik, yaitu pentingnya pemberian pemahaman tentang perbedaan-perbedaan yang terjadi dan berkembang dalam suatu masyarakat, baik itu perbedaan tentang nilai, norma, budaya, ideologi, doktrin/ajaran, ritus, maupun cara pandang. Sehingga berdampak positif dan konstruktif dalam mengembangkan kesadaran akan hakikat perbedaan, membangun solidaritas dan sekaligus menghilangkan prasangka negatif yang dapat mengakibatkan sikap agresivitas kolektif.²¹ Tindakan yang dimaksud yaitu meningkatkan intensifikasi interaksi yang terbuka dan manusiawi (mudah dipahami/dimengerti).

Bukan hanya itu, tetapi diperlukan juga pengaturan yang komprehensif dan manusiawi tentang kebebasan hidup beragama yang memuat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat yang merupakan umat beragama. Dengan begitu sikap paham yang menganggap bahwa kebenaran tidak hanya terdapat pada suatu kelompok yang berkaitan dengan ajaran agama atau dogma dapat

²⁰ Isre, *Konflik Etno Religius Indonesia Konteporer*, 94–96.

²¹ *Ibid.*, 91.

membangun struktur kondusif yang akan menciptakan solidaritas sosial dan toleransi hidup antar umat beragama karena adanya keterbukaan antar umat beragama.²² Tindakan yang tak kalah penting dan sangat strategis yaitu dialog antar umat beragama di semua lapisan masyarakat. Dialog dapat mencairkan bingkai fanatisme keagamaan. Dan di samping itu juga tercipta suasana yang dialogis dapat membangun sikap solidaritas dan saling menghormati antar umat beragama dalam masyarakat.²³

Salah satu usaha yang signifikan dan berdampak dalam menjalin perdamaian adalah Deklarasi Damai Malino I yang diumumkan pada bulan Desember 2001. Setelah Deklarasi Malino diumumkan dan terbukti berhasil dalam meredakan konflik, inisiatif perdamaian yang dilakukan oleh masyarakat memperlihatkan efektivitasnya. Meskipun kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk menerapkan kesepakatan Malino, namun inisiatif tersebut berasal dari akar rumput dan meliputi berbagai kegiatan seperti olahraga, kesenian, dan budaya. Menurut Kriesberg, semakin tinggi tingkat interaksi dan ketergantungan antara pihak yang sebelumnya terlibat konflik, semakin sulit bagi konflik baru untuk timbul. Selain itu.²⁴ Jadi, pengembangan pemahaman bersama dan norma-norma

²² Ibid., 106.

²³ Ibid., 109.

yang berkembang juga berpotensi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya konflik.

Pada tanggal 18-20 Desember 2001, Yusuf Kalla menggelar sebuah pertemuan di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan untuk memediasi konflik antara dua kelompok di Poso. Pertemuan tersebut dihadiri oleh dua puluh lima anggota dari pihak Islam, dua puluh lima anggota dari pihak Kristen, dan dua puluh lima mediator dari berbagai tokoh, termasuk Yusuf Kalla, H. Zainar Basri Palaguna, Pangdam VII/Wirabuana Mayjen Ahmad Yahya, Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Zainal Abidin Ishak, Din Syamsudin dari Majelis Ulama Indonesia, Natan Setiabudi dari Persekutuan Gereja di Indonesia, Mayjen Bambang Sutedjo dari Kantor Polkam, dan Mayjen Suwisma dari Mabes TNI. Pada pertemuan tersebut, kedua belah pihak berhasil mencapai sebuah kesepakatan untuk mengakhiri konflik dan menjaga perdamaian di Poso, Sulawesi Tengah. Proses mediasi tersebut dipimpin oleh Yusuf Kalla yang menghasilkan Deklarasi Malino, yakni sebuah pernyataan bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, pejabat tinggi Sulawesi, dan

²⁴ Louis Kriesberg, *Constructive Conflicts From Escalation to Resolution* (Maryland: Rowman and Littlefield Publisher Inc, 2003), 384.

beberapa aparat yang berwenang. Deklarasi tersebut berisi sepuluh poin kesepakatan dari kedua belah pihak.²⁵

Yusuf Kalla mengharapkan bahwa kesepakatan untuk menghentikan konflik yang dicapai dalam Deklarasi Malino dapat menjadi awal dari solidaritas dan rekonsiliasi antara kedua belah pihak. Para perwakilan dari Poso juga memberikan pujian atas kesepakatan tersebut, menganggapnya sebagai bagian dari upaya untuk membangun perdamaian dan ketertiban di antara para pihak yang sedang bertikai.

Jenderal Da'I Bachtiar, dalam pertemuan dengan Kepolisian Nasional, menyatakan keyakinannya bahwa Deklarasi Malino mencerminkan keinginan masyarakat Poso untuk hidup dalam kedamaian sebelum terjadinya konflik.²⁶ Upaya perdamaian yang sangat berpengaruh dalam menghentikan konflik Poso yaitu setelah terpilihnya atau ditunjuknya Yusuf Kalla menjadi pemimpin Mediator dalam upaya perdamaian di Poso.²⁷

C. Moderasi Beragama

KBBI mendefinisikan moderasi sebagai tindakan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kekerasan serta menghindari perilaku yang

²⁵ Ilovia Aya regita Widayat, Diana Mutiara Bahari, "Konflik Poso: Sejarah Dan Upaya Penyelesaian," 5.

²⁶ Ibid., 4-6.

²⁷ Alganih, "Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001)," 8.

bersifat ekstrem. Apabila seseorang dinyatakan sebagai individu yang bersikap moderat, artinya perilakunya normal, tidak berlebihan, dan tidak ekstrem. Pada umumnya, konsep moderasi mencakup nilai keseimbangan dalam berbagai hal, termasuk keyakinan, moral, dan karakter, baik ketika berinteraksi dengan individu lain maupun ketika berurusan dengan lembaga pemerintah.²⁸ Menjaga kesederhanaan dalam beragama adalah memperhatikan proporsi antara pengalaman keagamaan individu dan penghargaan terhadap cara beragama orang lain yang memiliki keyakinan yang berlainan. Peran moderasi agama menjadi sangat krusial dalam membangun toleransi serta keharmonisan yang positif, tidak hanya dalam skala lokal, namun juga nasional dan internasional.

Strategi semangat moderasi dalam beragama bertujuan untuk mencari kesepakatan dan solusi yang damai antara dua kutub ekstrim dalam beragama. Di satu pihak, terdapat kelompok ultra-konservatif yang meyakini satu tafsir agama yang benar secara mutlak dan menganggap penafsir lain sebagai sesat. Di sisi lain, terdapat kelompok ekstrem liberal yang terlalu berfokus pada akal sehingga mengabaikan keaslian agama dan mereduksi keyakinan mereka demi toleransi yang

²⁸ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta, 2019), 15.

tidak tepat terhadap pemeluk agama lain.²⁹ Oleh karena itu, kedua kelompok ini harus diimbangi dengan semangat moderasi.

Banyak kriteria, pembatasan, dan penunjuk dapat dirumuskan untuk mengevaluasi apakah suatu pandangan, sikap, atau perilaku keagamaan dianggap moderat atau ekstrem. Ada empat penunjuk moderasi keagamaan yang dapat dipakai, yaitu: kesetiaan pada negara, toleransi, anti kekerasan, dan keterbukaan terhadap budaya lokal. Empat indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi tingkat moderasi agama yang diamalkan oleh individu di Indonesia dan sejauh mana mereka rentan terhadap pengaruh ekstremisme.³⁰ Skala ini perlu dikendalikan untuk dapat mengidentifikasi serta mengambil tindakan yang tepat dalam memperkuat moderasi keagamaan.

Indonesia memiliki pondasi yang kokoh dalam memperjuangkan konsep moderasi agama di bidang sosial dan politik. Ada alasan yang sangat penting untuk mengenalkan konsep ini di Indonesia, yaitu keragaman masyarakatnya yang sangat multikultural. Indonesia sebagai sebuah bangsa memiliki keberagaman suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Dalam realitas kehidupan sehari-hari, keberagaman tersebut memastikan adanya perbedaan yang dapat menimbulkan konflik atau gesekan yang mengganggu keseimbangan. Oleh karena itu, moderasi

²⁹ Ibid., 7.

³⁰ Ibid., 42-43.

agama sangat dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan dalam menjalankan kehidupan beragama. Keseimbangan merupakan faktor yang sangat esensial sebab alam semesta diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk pasangan.³¹ Moderasi diimplementasikan guna menjamin bahwa seseorang yang menjalankan ajaran agama tidak cenderung ekstrim ke salah satu sisi dari pasangan yang diciptakan tersebut.

Di Indonesia, masalah kehidupan beragama terus menjadi fokus perhatian karena negara ini memiliki kekayaan budaya yang beragam. Sejak tahun 2010, Publibang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sudah melaporkan beberapa kasus keagamaan dalam laporan tahunannya. Konflik sering terjadi sebagai dampak dari isu-isu aktual seperti aliran, paham, gerakan keagamaan, pembangunan tempat ibadah, radikalisme, dan terorisme.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperkuat kesatuan dalam beragama. Meskipun akar konflik dapat bervariasi, seperti kesenjangan ekonomi, perseteruan politik, atau persaingan agama, pemahaman agama masyarakat menjadi penyebab utama. Ironisnya, agama seharusnya menjadi penghubung, tetapi justru menjadi pemicu konflik.

³¹ Ibid., 55.

Dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang inklusif untuk menangani permasalahan keagamaan, yang dapat menghormati variasi budaya dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai agama dengan tepat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamentalnya.³² Mempraktikkan moderasi dalam beragama merupakan hal yang amat penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan, dan Indonesia memiliki kekayaan sosial budaya yang kuat untuk menerapkan moderasi dalam beragama.

Sebagai individu yang memegang teguh keyakinan, pendekatan keagamaan dipilih sebagai upaya untuk memperkuat kesatuan umat. Dalam hal ini, ditekankan pentingnya memilih pendekatan beragama yang damai dan sejalan dengan nilai-nilai multikulturalisme yang menjadi karakter masyarakat Indonesia.³³ Dengan cara ini, penerapan moderasi agama yang inklusif, toleran, terbuka, dan fleksibel dapat menjadi solusi untuk mengatasi potensi konflik yang kerap timbul di tengah-tengah masyarakat yang beragam latar belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberagaman agama di Indonesia adalah suatu fakta yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, prinsip moderasi beragama digunakan untuk menggabungkan kesamaan, dan

³² Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 53–59.

³³ Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama Dalam Keagamaan Indonesia,” *Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 52.

tidak menekankan perbedaan sebagai hal yang utama. Ada beberapa alasan mengapa moderasi beragama itu sangat diperlukan, khususnya di Indonesia:

1. Menjaga keberagaman di Indonesia melalui moderasi adalah strategi kebudayaan penting. Pancasila dapat menyatukan suatu kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya yang ada di Indonesia sebagai negara multikultural. Agama memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan diintegrasikan dengan kearifan lokal serta diadaptasi oleh pemerintah dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan pemerintah.
2. Agama bertujuan menjaga kehormatan dan keselamatan manusia serta mengajarkan prinsip keseimbangan dalam semua aspek kehidupan. Kesederhanaan dalam praktik beragama penting untuk memastikan agama menjadi prinsip utama dalam kehidupan manusia, sehingga martabat dan kehormatan manusia terpelihara.
3. Manusia semakin bertambah dan beragam dengan perbedaan suku, warna kulit, dan budaya yang berkembang. Ilmu pengetahuan harus berkembang seiring zaman untuk mengatasi masalah kemanusiaan. Namun, teks-teks agama dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, sehingga kebenaran

menjadi relatif dan fanatisme dapat memicu konflik yang tersebar di seluruh dunia. Solusinya adalah menerapkan moderasi dalam beragama untuk menjaga eksistensi kemanusiaan tanpa konflik yang berlatar agama.³⁴

Dengan demikian, Moderasi keagamaan adalah suatu konsep yang mengedepankan jalan tengah dalam menghadapi keberagaman agama di Indonesia. Budaya moderasi ini merupakan bagian integral dari kebudayaan nusantara yang senantiasa beriringan seiring waktu dan selalu berusaha mencari solusi dengan penuh toleransi, bukan dengan konflik.³⁵ Moderasi beragama diharapkan dapat menjadi solusi. Moderasi beragama ini dapat dimaknai sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama yang berbeda. Jalan tengah inilah yang diyakini akan menghindarkan masyarakat dari sikap ekstrem dan eksklusif yang berlebihan. Moderasi beragama ini diharapkan terekspresikan dalam bentuk toleransi aktif yang sangat dibutuhkan dalam mewujudkan harmoni sosial.³⁶

³⁴ Abror, "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi: Kajian Islam Dan Keberagaman," 152-153.

³⁵ Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keagamaan Indonesia," 49.

³⁶ Dkk. Pipit Aidul Fitriyana, *Dinamika Moderasi Beragama Di Indonesia* (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020), 5-6.

1. Modal Sosial Kultural Moderasi Beragama

Sangat pentingnya peran agama dalam membentuk aturan sosial masyarakat di Indonesia tidak dapat disangkal. Meskipun agama mungkin mendorong pengikutnya untuk memiliki sikap yang mengecualikan, agama juga mengajarkan nilai-nilai inklusif dan toleransi. Agama hadir untuk menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap kebutuhan manusia.³⁷ Agama sangat penting diperhatikan karena memiliki kedudukan dan peran yang signifikan dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia memiliki sumber daya sosial yang tangguh dalam menghadapi perbedaan dan keragaman yang ada. Peristiwa konflik dan ketegangan dalam masyarakat tidak selalu mengindikasikan intoleransi dan sikap konservatif dalam beragama.³⁸ Terkadang, hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya data yang mengakibatkan komunikasi yang buruk dan kesalahpahaman sehingga menciptakan ketegangan.

Budaya gotong royong telah lama menjadi bagian penting kehidupan masyarakat Indonesia. Istilah ini berasal dari "angkat" atau "pikul" dan "royong" yang berarti "bersama-sama", dan artinya adalah

³⁷ RI, *Moderasi Beragama*, 63.

³⁸ *Ibid.*, 63–78.

bekerja sama dalam kegiatan untuk mencerminkan nilai moral seperti solidaritas, empati, saling membantu, dan kepentingan bersama.³⁹ Sikap gotong royong ini terlihat dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seperti merayakan acara, memberikan bantuan sosial, melakukan kegiatan pertanian, menghadapi bencana atau kematian, dan kegiatan sosial keagamaan, serta menggambarkan kesatuan dan persamaan di Indonesia.

2. Moderasi Beragama Untuk Penguatan Toleransi Aktif

Moderasi beragama tidak cukup berhenti pada lahirnya sikap toleran, namun perlu dirumuskan model toleransi yang lebih aktif, untuk kemajuan bangsa, menghindari kekerasan atas nama agama, dan membangun keagamaan yang moderat.

Secara umum, tidak mungkin memisahkan moderasi agama dari konsep toleransi. Berdasarkan berbagai penjelasan sebelumnya, moderasi agama dapat dianggap sebagai sebuah proses, dan toleransi dapat dilihat sebagai hasil yang tercapai jika moderasi dilakukan dengan baik.⁴⁰ Toleransi dalam konteks ini adalah sikap terbuka untuk mendengarkan pandangan yang berbeda dan menghormati keyakinan agama masing-masing. Hal ini sangat penting dalam menciptakan kerukunan nasional, yang merupakan pilar dalam pembangunan nasional. Untuk mencapai kerukunan nasional, prasyarat yang sangat penting adalah toleransi

³⁹ Ibid., 66–67.

⁴⁰ Ibid., 79.

terhadap agama-agama lain. Dengan memperlihatkan toleransi dan menghargai satu sama lain di antara para pengikut agama, akan mendorong terjalinnya interaksi yang positif dan pemahaman yang kuat antar masyarakat yang memiliki keyakinan yang berbeda. Dampaknya adalah kehidupan yang aman, tenteram, dan harmonis bagi seluruh anggota masyarakat.⁴¹ Toleransi adalah tolok ukur paling penting dalam menciptakan keharmonisan dan kedamaian di antara para penganut agama, serta saling menghargai perbedaan keyakinan dan kebebasan untuk melaksanakan ibadah masing-masing. Sebagai bangsa yang pernah mengalami berbagai konflik sosial dan keagamaan yang merugikan, Indonesia harus menyadari bahwa keberagaman adalah anugerah Tuhan yang harus dihargai dan dikelola dengan baik.

Untuk menjaga kebhinekaan, kita harus mengembangkan budaya toleransi yang sejati. Toleransi tidak boleh hanya terpaksa atau dibungkus dengan kepura-puraan, tetapi harus aktif dalam berkomunikasi, membangun kebersamaan, dan kerja sama dalam kehidupan sosial budaya.⁴² Penting bagi Indonesia untuk mempertahankan kebhinekaannya melalui sikap toleransi yang aktif. Tanpa itu, negara yang memiliki banyak keyakinan dan etnis yang beragam ini dapat hancur karena konflik.

⁴¹ Ibid., 80.

⁴² Ibid., 81.

Dengan demikian, keberadaan toleransi aktif dari pengikut agama menjadi sangat penting dalam menciptakan keselarasan sosial. Membangun kerukunan antara para pengikut agama bukanlah hal yang dapat dicapai hanya dengan menganggap perbedaan sebagai suatu faktor yang memecah belah masyarakat, melainkan juga memerlukan partisipasi aktif dari setiap pengikut agama. Partisipasi ini mencakup pengakuan akan keberadaan dan hak agama yang berbeda, serta upaya untuk memahami perbedaan dan kesamaan melalui interaksi sosial yang intensif, dengan tujuan mencapai keselarasan dalam keragaman sesuai dengan ideal yang diinginkan.

Toleransi merupakan sikap memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini.⁴³ Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada dan menerima dengan baik suatu perbedaan. Menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri serta berpikir positif.

⁴³Dkk Pipit Aidul Fitriyana, *Dinamika Moderasi Beragama Di Indonesia* (Jakarta: Litbangdiklat Press, 2020), 14.